

**SINERGITAS PEMERINTAH DAERAH DAN KEPOLISIAN
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MINUMAN
KERAS BERALKOHOL OPLOSAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam rangka penyelesaian
studi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**ERNAWATI
NIM. 5116500068**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI
2020**

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

SINERGITAS PEMERINTAH DAERAH DAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MINUMAN KERAS BERALKOHOL OPLOSAN

Disusun Oleh :

**ERNAWATI
NIM. 5116500068**

**Telah diuji dan dipertahankan dihadapan Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal :**

**Hari : Sabtu
Tanggal : 18 Januari 2020**


Penguji I


**TONI HARYADI, S.H., M.H.
NIDN. 0020045801**

Penguji II


**GUFRON IRAWAN, S.H., M.HUM.
NIDN. 0609086202**

Pembimbing I


**DR. H. SANUSI, S.H., M.H
NIDN. 0609086202**

Pembimbing II


**FAJAR DIAN ARYANI, S.H., M.H
NIDN. 0608087702**

**Mengetahui
Dekan,
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal**


**Dr. H. Achmad Irfan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
FAK. NIDN. 0615067604**



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI

**SINERGITAS PEMERINTAH DAERAH DAN KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MINUMAN KERAS
BERALKOHOL OPLOSAN**

Disusun Oleh :

**ERNAWATI
NIM. 5116500068**

**Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal :**

Pembimbing I



**DR. H. SANUSI, S.H., M.H
NIDN. 0609086202**

Pembimbing II



**FAJAR DIAN ARYANI, S.H., M.H
NIDN. 0608087702**

**PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ERNAWATI
NPM : 5116500068

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “SINERGISITAS PEMERINTAH DAERAH DAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MINUMAN KERAS BERALKOHOL OPLOSAN” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Saya menyerahkan skripsi dan hasil penelitian didalamnya menjadi milik fakultas hukum Universitas Pancasakti Tegal serta memberikan ijin untuk merecovery dan mempublikasikan dalam bentuk jurnal baik atas nama saya ataupun tidak melibatkan saya.

Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap karya saya ini.

Tegal, Januari 2020

Yang menyatakan



ERNAWATI

MOTTO

Amat mudah untuk memadamkan api yang sedang membara,
tetapi sukar untuk meredakan api kemarahan dalam diri.
Kecerdasan emosi adalah kemampuan merasakan, memahami,
dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi
sebagai sumber energi, informasi, koneksi, dan pengaruh yang
manusiawi.

[Robert K. Cooper]

.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- ❖ Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.
- ❖ Kedua Orang Tuaku, yang telah mendoakan dalam setiap sujud, dan setiap saat yang tak pernah bosan memberikan cinta kasihnya, dorongan, semangat.
- ❖ Teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal terutama sahabatku yang telah selalu memberikan motivasi
- ❖ Almamaterku Universitas Pancasakti Tegal

KATA PENGANTAR

Assallamu'alaikum, Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Sinergitas Pemerintah Daerah Dan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Minuman Keras Beralkohol Oplosan”. Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasannya. Dalam menyelesaikan Skripsi ini, Penulis meyakini dengan sepenuhnya tidak akan dapat menyelesaikan dengan baik tanpa bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Pd selaku Rektor Universitas Pancasakti beserta Para Wakil Rektor.
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti
3. Kanti Rahayu, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.

4. Dr. H. Sanusi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.
5. Imam Asmarudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.
6. Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.
7. Dr. H. Sanusi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 1 (satu) dalam skripsi ini yang telah memberikan bantuan petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 (dua) yang telah memberikan bantuan petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
9. H. Toni Haryadi, S.H., M.H., S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I Ujian Skripsi yang memberikan masukan terarah terhadap skripsi ini.
10. Gufron Irawan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji II Ujian Skripsi yang memberikan masukan terarah terhadap skripsi ini.
11. Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, atas bantuan dan ilmu yang sangat berguna selama mengikuti proses belajar. Khususnya Rumpun Hukum Pidana, atas bimbingan, kritik dan saran, serta ilmu yang sangat berharga.
12. Kedua Orang Tuaku, Keluarga Besarku tercinta, terimakasih atass supportnya sehingga selesainya skripsi ini.

13. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi dan skripsi ini.

Dengan penuh harap dan iringan do'a, semoga jasa kebaikan beliau sekalian diterima Allah SWT dan tercatat sebagai amal shalih. Akhir kata, karya ilmiah ini penulis haturkan kepada segenap pembaca, dengan harapan adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi sempurnanya karya ilmiah ini. Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah Swt. Amin.

Wassallamu alaikum,Wr.Wb

Tegal, 18 Januari 2020

Penulis,

Ernawati

ABSTRAK

ERNAWATI, 5116500068, SINERGITAS PEMERINTAH DAERAH DAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MINUMAN KERAS BERALKOHOL OPLOSAN

Penggunaan minuman beralkohol di Semarang cukup memprihatinkan berdasarkan data dari Dit Reserse Narkoba Polrestabes Semarang tahun 2016-2018 terdapat 25 kasus penggunaan miras diantaranya tersangka 15 orang laki-laki, dan 3 orang perempuan, dan dilakukan berdasarkan umur 14-60 tahun, untuk pengedar terdapat 6 tersangka dan terdapat 9 pengguna miras. Dalam hal ini tentunya miras bukan lagi masalah yang sepele, untuk itu diperlukan kerjasama antara pihak Kepolisian, lembaga pendidik, lembaga masyarakat untuk memberantas tindak pidana minuman keras tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini ingin mengetahui bagaimana penanggulangan tindak pidana minuman keras beralkohol oplosan yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang sebagai aparat penegak hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab penggunaan minuman keras beralkohol oplosan di Semarang dan bagaimana penanggulangan tindak pidana minuman keras beralkohol oplosan oleh Polrestabes Semarang. Metode penelitian, penulis menggunakan penelitian bersifat yuridis empiris, teknik pengumpulan data dengan melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga memperoleh data yang kongkrit.

Hasil penelitian mengenai faktor penggunaan minuman keras beralkohol oplosan sendiri adalah karena faktor minuman itu sendiri, karena seseorang apabila sudah mendapatkan kenikmatan dari penggunaan miras itu sendiri maka ia akan terus menggunakan karena kandungan miras dapat mengakibatkan candu sama halnya dengan narkoba. Berikutnya yaitu faktor individu yakni kurangnya pengetahuan, kurangnya iman, dan sifat yang labil dapat mudah sekali terpengaruh akan hal-hal yang negatif seperti halnya menggunakan miras. Faktor lingkungan tempat tinggal, yakni lingkungan yang bebas, yang mayoritas masyarakatnya mengkonsumsi miras lambat laun orang tersebut akan ikut mencoba dan akhirnya dijadikan sebuah kebiasaan, didukung dengan faktor keluarga yakni keluarga yang broken home dan kurang harmonis, sehingga kurangnya perhatian orang tua terhadap anak akan mudah sekali terjerumus ke hal negatif tersebut. Sinergitas Polrestabes Semarang dalam upaya menanggulangi hal tersebut adalah dengan upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif yakni dengan cara melakukan penyuluhan ke sekolah, masyarakat, membuat baliho, spanduk dan lain-lain. Upaya preventif yakni dengan cara melakukan patroli, pengawasan, dan melakukan razia ditempat-tempat tertentu. Sedangkan untuk represif yakni melakukan penegakan hukum terhadap pengedar atau pengguna berdasarkan peraturan yang ada.

Kata kunci: Minuman Beralkohol, Minuman Oplosan, Kepolisian, Tindak Pidana

ABSTRACT

ERNAWATI, 5116500068, LOCAL GOVERNMENT AND POLICE SYNERGITY IN MANAGEMENT OF HARD CRIMINAL DRINKING CRIME DRINKING

The use of alcoholic drinks in Semarang is quite alarming based on data from the Semarang Police Drug Investigation Directorate in 2016-2018 there were 25 cases of alcohol use including 15 suspected men, and 3 women, and carried out based on the age of 14-60 years, there were 6 dealers the suspect and there are 9 alcoholic users. In this case, alcohol is certainly no longer a trivial matter, for this reason collaboration between the Police, teaching institutions and community institutions is needed to eradicate the liquor crime. Based on this, this study wants to find out how to deal with the crime of adulterated alcoholic drinks made by Semarang Police as a law enforcement officer. The formulation of the problem in this research are the factors that cause the use of mixed alcoholic alcoholic beverages in Semarang and how to counteract the criminal acts of alcoholic alcoholic liquors by Semarang Police.

The research method, the author uses empirical juridical research, data collection techniques through interviews and literature study. Data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner by grouping data and selecting data obtained from research with a starting point at the problem then the results were arranged systematically so as to obtain concrete data.

The results of research on the use of alcoholic alcohol mixed with the factor itself is due to the factor of the drink itself, because if someone already gets pleasure from the use of alcohol itself, he will continue to use because the alcohol content can lead to opium as well as drugs. Next, the individual factors namely lack of knowledge, lack of faith, and unstable nature can be easily affected by negative things such as using alcohol. Environmental factors, namely a free environment, the majority of people who consume alcohol will gradually try and eventually become a habit, supported by family factors namely broken home family and less harmonious, so that the lack of parental attention to children will be easy once dropped into that negative thing. The synergy of the Semarang Polrestabes in an effort to overcome this is through pre-emptive, preventive and repressive efforts. Pre-emptive efforts namely by conducting counseling to schools, communities, making billboards, banners and others. Preventive efforts namely by patrolling, monitoring, and conducting raids in certain places. As for repressive law enforcement against dealers or users based on existing regulations.

Keywords: Alcoholic Beverages, Oplosan Beverages, Police, Criminal Acts

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Abstrak	x
Abstract	xi
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	13
G. Rencana Sistematika Penulisan Skripsi	19

BAB II KAJIAN TEORI.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Minuman Keras Beralkohol Oplosan	21
1. Tindak Pidana.....	21
2. Minuman Keras Beralkohol	28
3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Minuman Keras Beralkohol dan Larangan Penggadaa	43
4. Tindak Pidana Pengguna Minuman Keras Oplosan dan Sanksi Pidananya	47
B. Tinjauan Umum Tentang Polri sebagai Lembaga Penegak Hukum di Indonesia.....	48
1. Pengertian Polri di Indonesia dan Fungsi Polri.....	48
2. Tugas dan Wewenang Polri	51
3. Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana.....	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Faktor Penyebab Penggunaan Minuman Keras Beralkohol Oplosan di Kota Semarang	62
B. Upaya Polrestabes Semarang dalam Menanggulangi Tindak Pidana Minuman Keras Beralkohol Oplosan di Kota Semarang...	68
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan besar yang kini dihadapi Negara Indonesia adalah narkoba, Selain narkoba kini minuman keras beralkohol oplosan juga menjadi salah satu ancaman yang cukup buruk bagi Negara Indonesia. Minuman keras adalah tema klasik, masyarakat mengetahui, mengkonsumsi miras merupakan konsumsi yang berakibat negatif. Berdasarkan medis juga demikian, bahkan konsumsi miras berlebih dapat menyebabkan kematian¹.

Tidak sedikit orang yang meninggal dunia akibat minum-minuman beralkohol oplosan tersebut, akhir-akhir ini minuman beralkohol oplosan memakan korban, hal tersebut terjadi kota Semarang, Seorang warga Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang tewas seusai minum-minuman keras oplosan racikan sendiri. Alkohol yang dicampur minuman teh bersoda itu berkadar 70%, Korban adalah, Sunarto (34) warga Kp. Jetis Trawas Rt. 02 Rw 03 Kel. Cepoko Kec. Gunungpati Kota Semarang. Agus tewas pada hari Minggu, 20 Januari 2019. Sementara 3 rekannya dirawat di Puskesmas Gunungpati sebagaimana keterangan Panit II Satreskrim Polsek Gunungpati, Aiptu Hengky kepada wartawan².

¹ Khairu Nasrudin, "Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras", **Jurnal Hukum Khaira Ummah**, Vol. 12.no. 4, 2017, Mahasiswa Program Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, hlm. 2.

² <https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2019/01/21/tenggak-miras-oplosan-3-warga-kritis-1-tewas/>

Kejadian serupa terjadi di Jawa Barat dan kejadian ini masuk dalam Rana Kejadian Luar Biasa (KLB). Kejadian tersebut terjadi di Jawa Barat yaitu di Kabupaten Bandung yang jumlahnya sudah lebih dari 30 orang, dan juga di Kabupaten Sukabumi dan Kota Bandung. Berdasarkan keterangan Kabid Dokkes Polda Jabar Kombes Arios di Jl. Lengkong, Kota Bandung Selasa (10/4/2018)³.

"Untuk Kabupaten Bandung data terakhir korban meninggal sudah 35 orang. Di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi sebanyak 6 orang meninggal dunia dan Kota Bandung 4 orang. Total meninggal dunia di Jabar sudah 45 orang, Di Kota dunia. Sedangkan di Bandung, dari empat korban semuanya meninggal Kabupaten Sukabumi, dari total korban mengkonsumsi miras sebanyak 15 orang dengan jumlah korban meninggal 6 orang, tujuh orang dirawat dan 2 orang sudah di rumah. Di Kabupaten Bandung, dari total korban 105 orang di tiga rumah sakit, diantaranya meninggal dunia. Total meninggal 45 orang. Dirawat 65 orang dan dipulangkan 14 orang. Total korban 128 orang. Dan kini Pemkab Bandung telah menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) atas meninggalnya puluhan warga di Kabupaten Bandung akibat menenggak minuman keras (miras)."

Di Semarang Peredaran minuman keras (miras) masih relatif tinggi. Hal itu terbukti dengan ditemukannya Tim Reskrim Polsek Pedurungan menggrebeg sebuah rumah kos yang dijadikan rumah produksi minuman keras import oplosan, di Jalan Sendangsari, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Dalam penggrebekan tersebut, polisi mengamankan Yosia Anton Saputra (25) warga Plamongansari, Pedurungan, Kota Semarang dan barang bukti ratusan botol miras impor palsu berbagai jenis siap edar. Terungkapnya kasus tersebut bermula dari penyelidikan tim Reskrim Polsek Pedurungan

³ <http://jogja.tribunnews.com/2018/04/10/korban-tewas-akibat-miras-oplosan-di-bandung-terus-bertambah-kini-masuk-kejadian-luar-biasa>, diakses pada 16 April 2018 pukul 20:04.

terkait jual beli miras impor yang diduga palsu melalui Media Sosial. "Dari informasi tersebut kami lakukan penyelidikan dan berhasil memancing pelaku untuk melakukan transaksi di suatu tempat," ujar Kapolsek Pedurungan, AKP Eko Rubiyanto saat pres rilis, Kamis (28/11/2019). Dari keterangan pelaku, bisnis haram yang dilakukannya sudah berlangsung dua tahun dengan keuntungan mencapai jutaan rupiah. "Untuk sekali transaksi, saya mendapat keuntungan Rp 300 ribu hingga Rp 1 juta dan bisa dapat untung lebih besar kalau ada pesanan dalam jumlah besar," terang pelaku. Selain itu, pelaku mengaku, bisnis miras oplosan tersebut mulai dijalaninya atas idenya sendiri karena tidak ada pekerjaan lain. Selain menyita ratusan botol miras impor siap edar, polisi juga menyita bahan yang digunakan untuk mengoplos miras, diantaranya, alkohol, minuman bersoda, minyak kayu putih, penguat rasa, tinta dan beberapa bahan lainnya⁴.

Pengadaan miras di Semarang sendiri diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan. Selain itu aturan lain yang mengatur pengadaan miras diatur dalam (PERPRES) No. 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yakni pasal 300 tentang minuman memabukkan yakni berbunyi:

⁴ <http://www.rmoljateng.com/read/2019/11/28/23483/Produksi-Miras-Import-Oplosan,-Seorang-Pemuda-Ditangkap->

Pasal 300 ayat (1), berbunyi:

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500, di hukum: Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum-minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan nyata mabuk; Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seorang anak yang umurnya di bawah 16 tahun; dan Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minum-minuman yang memabukkan”.

Pasal 300 ayat (2), berbunyi:

“Kalau perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, sitersalah dihukum penjara selama - lamanya tujuh tahun”.

Pasal 300 ayat (3), berbunyi:

“Kalau perbuatan itu menyebabkan orang mati, si tersalah dihukum penjara selama - lamanya sembilan tahun”.

Pasal 536 KUHP

“Barang siapa yang nyata mabuk berada dijalan umum dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 225. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun, sejak ketetapan hukuman yang dahulu bagi sitersalah lantaran pelanggaran berupa itu juga atau pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, maka hukuman denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari.”

Anak, moral, dan kepribadian yang baik merupakan aset bangsa yang cukup besar, sehingga apabila anak sudah mengenal atau bahkan mencoba meminum-minuman keras beralkohol oplosan bisa berakibat fatal, karena bisa merusak moral dan kepribadian anak bangsa. Selain itu Miras oplosan memiliki efek pada tubuh, yaitu melemahkan sistem kekebalan tubuh,

merusak liver, menyebabkan diare dan rasa terbakar, menghambat konsentrasi, memperlambat refleks, menghilangkan keseimbangan, merusak lambung, bahkan kematian⁵. Minuman keras beralkohol ini memiliki persamaan dengan narkoba, yakni dapat memberikan efek candu terhadap penggunanya. Minuman keras beralkohol merupakan salah satu jenis dari NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif) tapi dalam bentuk minuman keras yang mengandung alkohol, tidak peduli seberapa besar kadar alkohol di dalamnya. Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menimbulkan adiksi (addiction) yaitu ketagihan dan dependensi (ketergantungan). Penyalahgunaan/ketergantungan NAZA jenis alkohol ini dapat menimbulkan gangguan Mental Organik yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, berperasaan dan berperilaku. Gangguan Mental Organik ini disebabkan langsung alkohol pada neuro-transmitter sel-sel saraf pusat (otak)⁶.

Minuman keras beralkohol marak digunakan dengan berbagai campuran bahan-bahan lain yang dikenal dengan “OPLOSAN”, Oplosan sendiri adalah campuran minuman beralkohol yang dioplos atau dicampur dengan bahan-bahan lain yang tidak dianjurkan untuk ditambah ke dalam bahan-bahan yang mengandung alkohol⁷.

Tidak sedikit kasus yang menunjukkan akibat dari masalah penggunaan minuman keras oplosan ini banyak membawa dampak

⁵ Sulis Winurini, “Remaja dan Perilaku Beresiko Terhadap Minuman Keras Oplosan”, **Jurnal Hukum**, Vol. X, No. 8/II/Pustil, 2018, hlm, 3.

⁶ Dadang Hawari, 2005, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat adiktif)*, Jakarta: Balai Penerbit FKUI, hlm 52.

⁷ *Ibid*

merugikan baik diri sendiri, orang lain, matriil maupun non matriil. Penggunaan minuman keras oplosan ini dapat menjadikan penyebab tindakan kriminal dikehidupan masyarakat, karena perubahan perilaku seseorang misal perkelahian, tawuran, dan tindakan kekerasan lainnya, gangguan fungsi sosial dan pekerjaan, gejala fisikologis, gejala psikologis misal perubahan alam perasaan, mudah marah, cepat emosi, gampang tersinggung, ngelantur, gangguan konsentrasi⁸.

Adami Chazawi juga menyebutkan bahwa minuman keras dapat menjadikan penyebab seseorang melakukan tindakan pidana karena minuman keras tersebut mengandung alkohol yang dapat menyebabkan keracunan dan dapat membius otak, yaitu tidak seimbang antara mental dengan badan kita, dengan ciri-ciri merasa kuat, hebat, gembira, memandang sepele terhadap bahaya dan konsentrasi berkurang⁹. Dengan demikian, dengan adanya banyak kasus di atas perlu dicari upaya yang tepat, ideal, dan aplikatif serta realistis dalam penanggulangan masalah penggunaan minuman keras beralkohol oplosan.

Sebagai generasi penerus bangsa, kita seharusnya mencegah dan memberitahukan kepada semua kalangan terutama kepada anak, supaya tidak terjerumus untuk mengonsumsi minuman keras beralkohol oplosan, karena betapa bahayanya minuman keras beralkohol untuk diri kita maupun orang lain dan masyarakat, maka dari itu penegakan hukum mempunyai peranan yang cukup besar. Penegakan hukum yang dimaksud adalah

⁸ Dadang Hawari, 2004, *Terapi dan Rehabilitasi Muthakhir Pasien NAZA*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, hlm. 40.

⁹ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Kesopanan*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 66.

penegakan hukum yang benar-benar memberikan efek jera terhadap pengguna minuman keras beralkohol oplosan. Penegakan hukum selain menurut ukuran ideal yang terumuskan dalam Undang-undang Kepolisian, Undang-undang Kehakiman, Undang-undang Kejaksaan, juga harus menerapkan 2 pola yakni pola isolasi dan pola integrasi. Sehingga penegakan hukum bergerak antara dua pola tersebut, yang artinya kedua pola tersebut memberikan batas-batas sampai mana kontribusi penegakan hukum bagi kesejahteraan rakyat¹⁰.

Dengan demikian penegakan hukum haruslah berperan aktif dalam menegakkan hukumnya, terutama disini adalah dari pihak kepolisian karena pihak kepolisian lebih tahu kejadian lapangannya dan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan demikian kita sebagai masyarakat terutama pihak kepolisian harus berupaya dan bekerja keras dalam memberantas tindak pidana minuman keras untuk menyelamatkan aset bangsa ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab penggunaan minuman keras beralkohol oplosan di Semarang?

¹⁰ Soejono Soekamto, 1983, Penegakan Hukum, Bandung: Bina Cipta, hlm. 52.

2. Bagaimana sinergitas Polrestabes Semarang dalam upaya menanggulangi tindak pidana minuman keras beralkohol oplosan di Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

4. Untuk mengetahui faktor penyebab penggunaan minuman keras beralkohol oplosan di Semarang.
5. Untuk mengetahui bagaimana Sinergitas Polrestabes Semarang dalam upaya menanggulangi tindak pidana minuman keras beralkohol oplosan di Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis simpulkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, memberi suatu wacana yang diharapkan dapat digunakan sebagai pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya dalam analisis Sinergitas Polrestabes Semarang dalam upaya menanggulangi tindak pidana minuman keras beralkohol oplosan di Semarang .

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan pemerintah, yaitu memberikan pengetahuan tentang Sinergitas Polrestabes Semarang dalam upaya menanggulangi tindak pidana minuman keras beralkohol oplosan di Semarang.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan penulis sebagai berikut:

1. Zulfa Azzah Fadhlika, dkk, 2019 dengan judul *“Fenomena Penjualan Miras Berjenis Ciu di Kawasan Bergota Kelurahan Randusari, Semarang Selatan dalam Kajian Kriminologi”*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dalam Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 5 (2) : 301-324. Membahas tentang Peredaran minuman beralkohol di Indonesia saat ini cukup luas karena di hampir setiap wilayah di wilayah hukum Indonesia terdapat toko kecil hingga toko besar yang menjual minuman beralkohol. Sebenarnya keberadaan minuman beralkohol sering menuai masalah di berbagai daerah karena yang menjadi perhatian kebanyakan orang adalah bahwa minuman tersebut hanya menimbulkan kerugian bagi peminum dan masyarakat sekitar, tetapi faktanya minuman beralkohol merupakan salah satu penyumbang bagi pemerintah daerah. Peneliiian

ini menggunakan metode observasi dengan memilih kota Semarang sebagai lokasi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara kepada penjual miras sebagai responden. Observasi berjalan dengan sedikit kendala, karena terdapat pertanyaan yang tidak ingin dijawab oleh responden, karena menurutnya menyangkut privasi, seperti mengenai identitas keluarga dan dimana tempat menyimpan minuman-minuman keras yang dijualnya, dan seperti wujud bagaimana miras tersebut dijual.

2. Elfira Noor Rizky, 2018, *Implementasi Kewenangan Kepolisian Dalam Penanggulangan Beredarnya Miras (Studi Kasus Di Sukoharjo)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta membahas tentang Peredaran miras yang ada di Indonesia semakin memperhatikan. Salah satunya peredaran minuman keras sendiri di daerah Sukoharjo, apalagi rumah produksi yang berada di daerah Sukoharjo tepatnya di Bekonang. Masalah utama dengan peredaran miras di masyarakat yang sampai sekarang masih ada saja penjual melakukan penjualan miras secara ilegal. Padahal sudah di jelaskan dalam Perda No 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol bahwa di daerah Sukoharjo peredaran miras sendiri adalah harusnya nol persen. Tetapi dengan masih adanya penjual dan pembeli dari minuman keras maka selaknya Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum yang ada di Indonesia melakukan tugas dan kewenangannya dalam

mencegah supaya masyarakat itu sendiri supaya tidak menjual dan membeli miras. Karena peraturan mengenai miras sendiri dalam Undang-Undang tentunya tugas utama Kepolisian untuk mencegah penanggulangan miras tanpa adanya izin maupun mengupayakan agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang ada.

3. Firman Yoga Rizki Wiratomo. 2014. *Penyidikan Terhadap Penjual Minuman Keras Beralkohol “Oplosan” Di Kota Malang Yang Konsumennya Meninggal Dunia (Studi Di Polres Kota Malang)*. Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, membahas tentang penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses penyidikan terhadap penjual minuman keras beralkohol “oplosan” yang konsumennya meninggal dunia dan untuk mengetahui kendala dan upaya penyidik kepolisian. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasi dan mengkaji peraturan hukum yang terdapat pada masyarakat serta mendeskripsikan upaya pihak kepolisian dalam mengatasi masalah tentang penjualan minuman keras beralkohol yang beredar di masyarakat. Regulasi yang mengatur tentang peredaran minuman keras beralkohol di Kota Malang terdapat pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol. Hasil penelitian ini adalah diungkapnya kasus-kasus

penjualan minuman keras oleh Satuan Samapta Bhayangkara (SABHARA) dari Tahun 2013 sampai 2014. Dari data ungkap kasus yang didapat dari SABHARA menunjukkan adanya 14 kasus yang terjadi, diantaranya 5 kasus di tahun 2013 dan 9 kasus terjadi di tahun 2014. Berdasarkan data peristiwa tersebut SABHARA juga mengungkap kasus korban mati akibat minuman keras beralkohol “oplosan” yang tercatat terdapat 15 kasus korban meninggal dan 5 diantaranya masih berada dibawah umur.

4. Andri Winjaya Laksana,SH,MH, 2014, *Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Kejahatan Akibat Minuman Keras Di Kota Semarang (Studi Kasus Di Polwiltabes Semarang)*. Dosen Fakultas Hukum Unissula Semarang, membahas tentang Mengonsumsi minuman keras menimbulkan berbagai penyakit sosial, melahirkan berbagai bentuk penyimpangan yang buruk dalam perilaku, moral, agama, psikologi, dan kesehatan. Minuman keras bisa dikatakan merupakan embrio dari kejahatan, karena ketika seseorang berada dibawah pengaruh minuman keras mempunyai kecenderungan melakukan perbuatan kriminal, misalnya melakukan penganiayaan, perampokan, pencurian, pemerasan, dan bahkan pembunuhan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder yang berupa peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap

data primer di lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh dalam upaya kepolisian dalam mengatasi tindak kejahatan akibat minuman keras antara lain yaitu meliputi upaya pre-emptive, upaya preventif serta upaya represif sedangkan hambatan yang muncul dalam upaya Kepolisian dalam mengatasi kejahatan akibat minuman keras karena masih ada tradisi meminum minuman keras untuk merayakan suatu peristiwa di beberapa daerah misalnya dalam suatu perkawinan atau upacara adat, perbuatan oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab yang melindungi pengedar dan penjual minuman keras, belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai minuman keras, belum adanya sanksi yang tegas bagi pengedar, penjual, dan pembeli minuman keras yang melebihi standar yang ditentukan, serta kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian dengan mengkaji bagaimana fakta-fakta yang terjadi dalam penanggulangan dan faktor penyebab penggunaan minuman keras beralkohol oplosan¹¹.

¹¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, *Metode Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY, Komunika, hlm. 32-33

Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis dan preskriptif¹². Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum¹³. Penelitian yang dikaji penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter mahmud Marzuki adalah sebagai berikut¹⁴:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*)
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

¹² hilipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm.1

¹³ *Op.cit*, hlm 22

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm 93

e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*the case approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap¹⁵.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian melakukan wawancara kepada Bhabinkamtibmas, perangkat desa dan masyarakat Desa Dinuk Kabupaten Tegal.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti diambil dan diolah dari bahan dokumen kepustakaan¹⁶, data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer. Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan

¹⁵ *Ibid*, hlm 24

¹⁶ *Ibid*, hlm. 317.

studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim¹⁷. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 5) Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- 6) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Larangan Minuman Oplosan. Bahan Hukum Sekunder.
- 7) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan di Kota Semarang.

¹⁷ *Ibid*, hlm 141

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi¹⁸. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

- 1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
- 2) Makalah-makalah
- 3) Jurnal ilmiah
- 4) Artikel ilmiah

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus hukum
- 3) Situs internet yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana ringan melalui pendekatan non penal.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm 142

yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen (studi kepustakaan).

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada responden untuk mendapat suatu data atau informasi. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan bentuk tidak struktural dimana pertanyaan yang diajukan secara bebas kepada responden. Akan tetapi sebelum melakukan wawancara tetap membuat poin poin penting yang harus di wawancara sebelum wawancara tersebut dilakukan. Untuk pemilihan responden dilakukan dengan cara random sampling dimana pemilihan responden sesuai kriteria yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis¹⁹. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana ringan melalui pendekatan non penal.

5. Metode Analisis Data

Hasil dari penelitian ini nantinya oleh peneliti akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data berdasarkan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm 21

kualitas dari data tersebut kemudian dideskriptifkan dengan menggunakan kata kata sehingga menghasilkan gambaran atau pargumentasi dalam bentuk kalimat yang sistematis dan mudah di pahami kemudian di tarik kesimpulan. Dimana kesimpulan tersebut dapat menjawab permasalahan yang ada.

G. Rencana Sistematika Penulisan

Rencana laporan penelitian ini akan disusun dalam empat bab yang masing-masing saling berkaitan. Keempat bab tersebut sebagai berikut:

BAB I penulisan skripsi yang ditulis oleh Penulis mencakup mengenai PENDAHULUAN yang terdiri Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, penulisan skripsi yang ditulis oleh Penulis ini mengenai Tindak Pidana Minuman Keras Beralkohol Oplosan dan Polri sebagai Lembaga Penegak Hukum di Indonesia

BAB III penulisan skripsi yang ditulis oleh Penulis ini mengenai HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang mana meneliti dan menganalisis tentang Faktor Penyebab Penggunaan Minuman Keras Bralkohol Oplosan di Semarang dan Sinergitas Polrestabes Semarang dalam Menanggulangi Tindak Pidana Minuman Keras Beralkohol Oplosan di Kota Semarang..

BAB IV dalam penulisan skripsi yang ditulis oleh Penulis mengenai PENUTUP yang mana terdiri dari kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah yang dibuat oleh Penulis, dan selanjutnya dilengkapi dengan saran yang membangun dari Penulis sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Minuman Keras Beralkohol Oplosan

1. Tindak Pidana

(a) Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai Istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana ini biasanya disinonimkan dengan istilah delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*. Dalam kamus hukum delik dijelaskan yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (Tindak Pidana)²⁰.

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan sebutan *strafbaarfeit* dan di dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana²¹.

²⁰ Sudarsono, 2017, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 92.

²¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Indonesia, hlm. 20.

Berikut adalah beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut pakar, yakni:

Menurut Pompe, Pompe merumuskan yang sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai berikut:

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut demi terpeliharanya tata tertib hukum.”²²,

Moeljatno menyebutkan tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut:

”Suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan yang mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.”²³

Menurut para sarjana Indonesia, pendapat Satochid Kertanegara memberikan pengertian tentang tindak pidana yaitu tindak (Tindakan) mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*Actieve Handeling*) atau pengertian tidak melakukan perbuatan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan, (*Passieve Handeling*). Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*Passieve Handeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakukan, istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan untuk terjemahan pidana untuk “*Straffbaar*” adalah sudah tepat²⁴.

²² P.A.F., Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 182.

²³ *Ibid.*, hlm. 25.

²⁴ Rahman Syamsiddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 64.

Jonkers merumuskan bahwa: “Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”²⁵

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat adalah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
2. Lebih singkat, efisien, dan netral, dapat mencakup delik-delik khusus yang subyeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
3. Orang menggunakan istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan melawan hukum juga menggunakan delik;
4. Pengertiannya, sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
5. Tidak menimbulkan kejangalan seperti “Peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan perbuatannya).²⁶

(b) Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk adanya pidana itu harus dipenuhi oleh beberapa syarat tertentu. Syarat-syarat ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dikenakan pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan

²⁵ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 20

²⁶ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 231-232

memenuhi syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur dalam arti sempit dari tindakan pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam pasal 362 KUHP²⁷.

Menurut Laminting, bahwa setiap tindak pidana di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhudungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan²⁸.

1. Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
 - a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*culpa/dolus*);
 - b. Maksud atau *vooremen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 - c. Macam-macam maksud, misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll;
 - d. Merencanakan terlebih dahulu, misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

²⁷ Sudarso, 1990/1991, *Hukum Pidana 1 A-1 B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, hlm.43.

²⁸ Laminting, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 173-174.

- e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan pidana menurut Pasal 308 KUHP.
2. Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana:
- a. Sifat melawan hukum;
 - b. Kualitas si pelaku;
 - c. Kuasalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat²⁹.

Berkaitan dengan pengertian diatas, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana, yang dibagi menjadi dua aliran yakni aliran Monistis dan aliran Dualistis.

Para ahli yang berpandangan aliran Monistis, yaitu:

1. D. Simons, sebagai penganut aliran Monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah “*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handling van een toerekeningsvatbaar person.*” Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah: (a) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan); (b) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*); (c) Melawan hukum (*onrechtmatig*); (d) Dilakukan dengan kesalahan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 184

(met schuld in verband staad); (e) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsyatbaar person)³⁰.

2. Menurut Van Hamel, unsur-unsur tindak pidana adalah: (a) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang ; (b) Bersifat melawan hukum; (c) Dilakukn dengan kesalahan, dan; (d) Patut dipidana.
3. E. Mazgar, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya sebagai berikut: (a) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan); (b) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif atau subyektif); (c) Dipertanggungjawabkan kepada seseorang; (d) Diancam dengan pidana.
4. J. Baumman, juga menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik: (a) Bersifat melawan hukum, (b) Dilakukan dengan kesalahan³¹.

Dari beberapa pendapat ahli diatas yang beraliran monistis dapat disimpulkan bahwa tidak ada pemisah antara criminal art dan criminal responsibility. Berikutnya lebih lanjut para ahli yang menganut aliran Dualistis adalah sebagai berikut:

1. H.B. Vos, menyebutkan bahwa hanya ada dua unsur dalam Strafbareit: (a) Kelakuan manusia; dan (b) Diancam pidana dengan undang-undang.

³⁰ Sudarto, Op.Cit., hlm. 32

³¹ Sudarto, Loc.Cit.

2. W.P.J. Pompe, menyebutkan menurut hukum positif *Strafbaarfeit* adalah tindakan lain dari *Feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.
3. Moeljatno, memberikan arti tentang *Strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur: (a) Perbuatan manusia; (b) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil); dan (c) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagaimana perbuatan yang baik tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata pergaulan masyarakat yang dicitakan oleh masyarakat.

Dengan demikian pandangan para ahli yang menganut aliran dualistik ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*³².

³² *Ibid.*, hlm. 27.

(c) Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar, sebagai berikut:

1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - a. Kejahatan (*Misdrijven*). Kejahatan diatur dalam buku II KUHP, yang dimaksud dengan kejahatan menurut Memorie Van Toelichting adalah delik hukum yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, yakni sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
 - b. Pelanggaran (*overtredingen*). Pelanggaran di dalam KUHP diatur dalam buku III. Pelanggaran disebut juga sebagai witsdelicten (delik undang-undang), adalah perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Itulah yang membedakannya dengan kejahatan. Adapun yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan dari pada kejahatan. Hal itu dapat diketahui dari ancaman pidana penjara, tapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

2. Berdasarkan niat si pelaku

a. Kesengajaan.

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung suatu unsur kesengajaan. Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

b. Kealpaan.

Tindak pidana kealpaan (culpa) adalah tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan atau tanpa kesengajaan. Menurut Simons, kealpaan adalah³³: "Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga

³³ Simons dalam Leden Marpaung, 2008. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 25.

lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan, tentu dalam hal ini mempertimbangkan ada atau tidaknya dapat diduga lebih dahulu, itu harus diperhatikan si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.”

3. Berdasarkan rumusan delik

- a. Delik Formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Tindak pidana dianggap telah terjadi jika seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan rumusan salah satu pasal dalam peraturan pidana³⁴.
- b. Delik Materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Tindak pidana dianggap telah terjadi jika akibat yang dilakukan tersebut telah terjadi³⁵.

4. Dari segi macam perbuatannya

- a. *Delicta Commissionis* adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, yaitu tindak pidana

³⁴ Yeni Widowaty, dkk, 2007, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, LAB HUKUM, hlm.26.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 27.

yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

- b. *Delicta ommissionis* adalah tindak pidana yang terjadi karena seseorang tidak berbuat sesuatu.

5. Berdasarkan cara penuntutannya

- a. Delik Biasa (*gewone delicten*), yang dimaksud delik biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.
- b. Delik Aduan (*Kloch Delicten*), delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya.

6. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancam

- a. Tindak pidana bentuk pokok,
- b. Tindak pidana yang diperberat,
- c. Tindak pidana yang diperingan.

Tindak pidana pokok dirumuskan secara lengkap, yang artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, misal pencurian, pembunuhan, penggelapan, pemalsuan surat, pemerasan dll.

Karena disebutkan secara lengkap unsur-unsurnya, pada rumusan bentuk pokok terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan atau yang diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan hanya menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur-unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

7. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan
 - a. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja³⁶.
 - b. Tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesai dan dapat dipidanya pembuat, disyaratkan dilakukan secara berulang³⁷.

³⁶ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Pidana Bagian 1*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 136.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

2. Minuman Keras Beralkohol

(a) Pengertian Minuman Keras Beralkohol

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, minuman keras adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Minuman keras alkohol dalam kehidupan sehari-hari mempunyai suatu fungsi ganda yakni fungsi yang saling bertentangan, disatu sisi alkohol merupakan suatu zat yang dapat digunakan untuk membantu manusia terutama saat dalam bidang medis/kedokteran untuk digunakan sebagai pembersih luka, untuk perangsang nafsu makan dalam tonikum dan juga dapat digunakan sebagai kompres. Akan tetapi dalam sisi yang lain alkohol juga sebagai boomerang atau suatu ancaman yang sangat membahayakan dan menakutkan karena dijadikan sebagai minuman yang dikalangan masyarakat telah menjadi sumber kerawanan dan kesengajaan dalam masyarakat itu sendiri³⁸.

Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol sendiri adalah bahan psiko aktif dan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai Negara, penjualan

³⁸ Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi*, Bandung, Remaja Karya, hlm. 29.

minuman keras beralkohol dibatasi kesejumlah kalangan aja, umumnya pada orang-orang yang telah berusia tertentu³⁹.

Minuman keras beralkohol adalah salah satu jenis NAZA (Narkotik, Alkohol dan Zat Adiktif) yang dalam bentuk minuman keras yang mengandung alkohol tidak peduli berapa kadar alkohol didalamnya. Alkohol termasuk zat adiktif yang artinya zat tersebut dapat menimbulkan adiksi (*Addiction*) yaitu ketagihan atau ketergantungan atau ketagihan. Penyalahgunaan/ketergantungan NAZA jenis alkohol ini dapat menimbulkan gangguan mental organik yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, berperasaan dan berperilaku. Gangguan mental organik ini disebabkan langsung oleh alkohol pada neuro-transmitter sel-sel saraf pusat otak⁴⁰.

Alkohol merupakan zat yang paling sering disalahgunakan manusia, diperoleh atas peragian (fermentasi) dari madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, etanol disebarkan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar dalam darah orang akan menjadi depresi⁴¹.

³⁹ <http://pojokkidul.com/2018/05/06/minuman-keras-identik-dengan-minuman-beralkohol/>, diakses 14 Januari 2020 pada pukul 09:23 WIB.

⁴⁰ Dadang Hawari, Ibid., hlm. 52.

⁴¹ Hartati Nurwijaya & Zullies Ikawati, 2010, *Bahaya Alkohol*, Jakarta, Elex Media Komputindo, hlm. 18

Masalah minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol yang dikonsumsi oleh masyarakat luas ini merupakan salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Mengonsumsi minuman keras yang berlebihan sangat berpengaruh bagi sikap dan tingkah laku yang mengarah terhadap penyimpangan (*deviasi*), seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan atau keributan yang dapat mengganggu ketertiban umum atau masyarakat, hal itu disebabkan karena pengaruh dari miras alkohol tersebut yang menyebabkan kurangnya kontrol diri⁴².

Masalah minuman keras kini hangat dibicarakan dalam kalangan masyarakat karena berdampak negatif yang merusak peminumnya dan merusak masyarakat, serta lebih menimbulkan berbagai kejahatan kriminal⁴³. Banyak korban yang berjatuh akibat minuman keras ini, karena yang tidak wajar. Meskipun demikian, minuman keras ini kerap digunakan sebagai minuman untuk acara adat ataupun sebagai minuman senang-senang. Karena minuman ini ternyata menyebabkan efek ketagihan dan alkohol jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan suatu penyakit⁴⁴. Selain itu Mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan hingga hilangnya kesadaran bagi pemakainya dapat dikatakan sebagai awal dari tindakan-tindakan yang

⁴² Soedjono Dirdjosisworo, *Ibid.*, hlm. 111.

⁴³ Ali Hasan, 2000, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Cetakan Kedua, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 173.

⁴⁴ Hartati Nurwijaya, 2009, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, Jakarta, Elex Media Komputindo, hlm. 1.

melanggar aturan hukum yang berlaku, baik itu kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, penganiayaan, pencurian, pembunuhan bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga pemakai minuman beralkohol⁴⁵.

(b) Minuman Keras Beralkohol Oplosan

Minuman keras oplos adalah minuman keras yang dibuat dari bermacam-macam bahan yang mengandung alkohol dan dicampur menjadi satu, serta mempunyai kadar alkohol yang bervariasi. Bahan-bahan yang digunakan untuk minuman keras oplosan adalah Miras dengan minuman berenergi, Miras dengan susu, Miras dengan cola atau minuman bersoda, Miras dengan spiritus atau jenis miras yang lain dan Miras dengan obat-obatan⁴⁶.

Pengaturan dilakukan hanya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan zat NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif), yang dimaksud disini adalah penyalahgunaan zat yang pemakaiannya tanpa resep dari dokter⁴⁷. Akan tetapi pada kenyataannya zat ini banyak digunakan tanpa resep dokter dan digunakan dan diperjual belikan secara illegal.

⁴⁵ Riska Mardatila. P., "Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut KUHP 351", **Jurnal Lex Crimen**, Vol. VI, No. 2, 2017, hlm. 3

⁴⁶ pengertian Minuman Keras Oplos.<http://edisicetak.joglosemar.co/berita/minuman-keras-oplosan-107417.html>, diakses tanggal 15 Desember 2019 Pukul 00.52 WIB.

⁴⁷ Dadang Hawari, 1991, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adektif*, Jakarta, Fakultas Hukum UI, hlm. 42.

(c) Bahan-Bahan Yang Dicampurkan Untuk Membuat Minuman Keras Oplosan

Bahan-bahan yang digunakan untuk campuran membuat miras oplosan⁴⁸ :

- 1) Miras Dengan Minuman Berenergi. Untuk mendapatkan cita rasa yang lebih baik, penggemar minuman keras sering menambahkan suplemen minuman berenergi kedalam minumannya. Oplosan ini sering disebut “sunrise” dan bisa mengurangi rasa pahit pada minuman beralkohol atau pada rasa menyengat pada alkohol yang kadarnya lebih tinggi. Meski kadar alkohol menjadi sedikit berkurang, efek samping yang lain akan muncul dalam pengoplosan ini. Alkohol bersifat menenangkan, sedangkan suplemen berfungsi sebagai stimulant. Jika digabungkan maka efeknya bisa memicu gagal jantung.
- 2) Miras Dengan Susu. Salah satu jenis oplosan yang sering menyebabkan korban tewas adalah “Susu Macan” yakni minuman keras yang dicampur dengan susu. Jenis minuman ini banyak dijual di warung-warung miras tradisional.
- 3) Miras Dengan Cola Atau Minuman Bersoda. Salah satu oplosan yang sangat populer adalah “Mansion Cola” yang terdiri dari Vodka dicampur dengan minuman bersoda. Tujuannya adalah

⁴⁸ Muchtadi TR, Sugiyono, 1992, *Ilmu Pengetahuan Bahan Pangan*, Bogor, PAU IPB, hlm. 36.

untuk memberikan cita rasa atau menutupi rasa tidak enak pada minuman keras.

- 4) Miras Dengan Spiritus Atau Jenis Miras Yang Lain. Di warung-warung tradisional pengoplosan beberapa jenis minuman keras dilakukan untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Minuman yang biasanya dicampur dengan spiritus adalah Vodka atau jenis minuman keras lain yang tidak jelas kandungan alkoholnya. Jenis minuman alkohol yang dikonsumsi hingga jumlah tertentu adalah alkohol dengan 2 atom karbon atau etanol. Sementara alkohol dengan satu atom karbon atau metanol umumnya digunakan sebagai pelarut atau bahan bakar, sehingga sangat beracun jika diminum. Dikutip dari Medschl.cam.ac.uk bahwa 10 ml etanol cukup untuk menyebabkan kebutaan dan 30 ml akan menyebabkan dampak lebih fatal termasuk kematian⁴⁹.
- 5) Miras Dengan Obat-Obatan. Dengan anggapan akan mendongkrak efek alkohol, beberapa orang menambahkan obat-obatan kedalam minuman keras. Mulai dari obat tetes mata, obat sakit kepala, hingga obat nyamuk. Karena akan meningkatkan aktivitas metabolisme, efek samping paling nyata dari jenis Oplos ini adalah kerusakan hati dan ginjal. Efek lainnya sangat beragam tergantung jenis obatnya. Seseorang mencampur obat-

⁴⁹ Ibid.

obatan kedalam minuman keras biasanya bukan penikmat alkohol. Tujuannya jelas hanya untuk mendapatkan efek memabukkan atau sekedar untuk keberanian alias adu nyali.

(d) Penggolongan Minuman Keras Beralkohol

Minuman keras sesuai dengan Peraturan Kesehatan (Permankes) RI No: 86/Men.Kes/Per/IV/77 menyebutkan bahwa minuman keras beralkohol termasuk minuman keras. Minuman jenis ini dikategorikan kedalam tiga golongan yakni:

1. **Golongan A.** Minuman yang masuk ke dalam golongan ini adalah minuman dengan kadar etanol (C_2H_5OH) sebesar 1 % hingga 5%. Minuman yang masuk dalam kategori ini adalah:
 - a. Bintang Baru Bir: isi 330 ml/botol
 - b. Champiod Anggur Buas: isi 290 ml/botol
 - c. Green Sand: isi 296 ml/botol
 - d. Sand Miquel: isi 1000 ml/botol
 - e. Jinro (Korean Ginseng Wine): isi 720 ml/botol
 - f. Tiger Lager Beer: isi 64 ml/botol
 - g. Anker Bir: isi 330 ml/botol
 - h. Heineken Nier: isi 330 ml/botol
 - i. Wolf (Guinness Foreign Extra Stout): isi 330 ml/botol
 - j. Baby Breem: isi 100 ml/botol

2. **Golongan B**, Minuman yang masuk ke dalam golongan ini adalah minuman dengan kadar etanol (C_2H_5OH) sebesar 5% hingga 20%. Minuman yang masuk dalam kategori ini adalah:
 - a. Anggur Malaga: isi 350 cc/botol
 - b. Anggur Koleson Camp 39: isi 600 ml/botol
 - c. Whisky (Asoka Pelikan): isi 1000 cc/botol
 - d. Kucing Anggur Ketan Hitam: isi 650 cc/botol
 - e. Lengken Port Intisari: isi 750 cc/botol
 - f. Koleson Anggur Beras Kencur: isi 650 ml/botol
 - g. Mahoni (Anggur): isi 300 l/botol
 - h. Malaga: isi 650 cc/botol
 - i. Mc. Donald (Arak Koleson): isi 650 ml/botol
 - j. Orang Tua Anggur: isi 620 ml/botol
3. **Golongan C**. Minuman yang masuk ke dalam golongan ini adalah minuman dengan kadar etanol (C_2H_5OH) sebesar 20% hingga 55%. Minuman yang masuk dalam kategori ini adalah:
 - a. Kuda Mas (Brendi) isi: 620 cc/botol
 - b. Kuda Pacu Jenever isi: 600 cc/botol
 - c. Mansion House (Brandy VSOP) isi: 720 ml/botol
 - d. Mc Donald (Brandy VSOP) isi: 720 ml/botol
 - e. Orang Tua Arak isi: 725 cc/botol
 - f. Scotch Brandy: isi 620 cc/botol
 - g. Sea Hors (Brandy) isi: 725 cc/botol

h. Stevenson (Brandy) isi: 600 ml/botol

i. T.K.W Brandy isi: 325 cc/botol

j. Winarco Anggur isi: 640 cc/botol

Dalam perda Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Larangan Minuman Oplosan menyebutkan bahwa jenis minuman keras beralkohol adalah:

1. **Produksi dalam negeri**, minuman ini merupakan minuman yang diproduksi oleh produsen, produsen yang dimaksud adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
2. **Impor**, merupakan minuman beralkohol yang diproduksi oleh Negara lain, pengadaan minuman beralkohol impor dilakukan oleh perusahaan yang memiliki penetapan sebagai IT-MB dari menteri yang menyelenggarakan.
3. **Tradisional**, merupakan minuman yang digunakan untuk kepentingan kegiatan upacara budaya, adat istiadat dan/atau keagamaan, minuman ini diproduksi oleh produsen yang telah memiliki izin dari Dinas Kabupaten/kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perindustrian. Minuman tradisional harus memiliki dan memenuhi standar mutu produk. Pengujian

ini dilakukan oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang obat dan makanan.

(e) Unsur-unsur Tindak Pidana Minuman Keras

Hari Sasongko mengatakan bahwa dalam KUHP masalah tindak pidana minuman keras diatur dalam 3 buah Pasal, yaitu Pasal 300, Pasal 492, dan Pasal 536. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal- pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana minuman keras adalah sebagai berikut⁵⁰:

1. Dengan sengaja menjual atau menyerahkan minuman yang memabukkan kepada orang yang dalam keadaan mabuk (pasal 300 ayat (1) ke 1).
2. Dengan sengaja membuat mabuk seorang anak dibawah usia 16 tahun (pasal 300 ayat (1) ke 2).
3. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan sengaja memaksa orang untuk meminum yang memabukkan (pasal 300 ayat (1) ke 3).
4. Dalam keadaan mabuk berada di jalan umum (pasal 536 ayat (1))

Seseorang yang betul-betul mabuk, tidak bisa berbuat apa-apa. Terhadap orang yang melakukan tindakan pidana dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya karena sebelum mabuk seseorang sudah bisa berpikir akibat-akibat apa yang bisa terjadi pada

⁵⁰ Hari Sasongko, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 117.

seseorang yang sedang mabuk. Minuman yang memabukkan kepada orang lain yang dalam keadaan mabuk, membuat mabuk seseorang anak dibawah umur, dalam keadaan mabuk mengganggu ketertiban umum dan dalam keadaan mabuk berada di jalan umum.

3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Minuman Keras Beralkohol dan Larangan Penggadaa Minuman Keras Oplosan

Dalam peredarannya miras dapat dikenakan Hukuman berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP mengatur mengenai masalah penyalahgunaan alkohol atau tindak pidana minuman keras yang tersebar dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 300; Pasal 492; Pasal 536; Pasal 537; Pasal 538; Pasal 539 KUHP, hal tersebut dikarenakan miras dapat berakibat fatal yakni menyebabkan kematian bagi penggunanya.

Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pasal 300 KUHP:

- (1) dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500 dihukum:
 1. Siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minuman-minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.
 2. Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yang umumnya dibawah 18 tahun.
 3. Barang siapa dengan sengaja dengan kekerasan atau ancaman dengan sengaja memaksa orang akan minum-minuman yang memabukkan.
- (2) Kalau perbuatan itu menyebabkan luka-luka pada tubuh, si tersalah dikukum selama-lamanya tujuh tahun.
- (3) Kalau perbuatan itu menyebabkan orang mati, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- (4) Kalau si tersalah itu menyebabkan kejahatan itu dalam jabatan ia dapat dipecat dari pekerjaan itu.

b. Pasal 492 KUHP:

- (1) Barang siapa yang sedang mabuk, baik di tempat umum jalanan atau mengganggu ketertiban, baik mengancam keamanan orang lain maupun suatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati dan benar supaya tidak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain dihukum kurungan selama-lamanya enam hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp 375.
- (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lagi lewat satu tahun sejak putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah karena pelanggaran serupa itu juga atau lantaran pelanggaran diterapkan dalam pasal 536 maka ia dihukum kurungan selama-lamanya dua minggu.

c. Pasal 536 KUHP:

- (1) Barang siapa nyata mabuk ada di jalan umum, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 225.
- (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum satu tahun, sejak ketetapan hukum yang dahulu bagi si tersalah lantaran pelanggaran serupa itu juga atau pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 492, maka hukuman denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari.
- (3) Bila terjadi pengulangan kedua kalinya dalam satu tahun setelah pemidanaan pertama berakhir dan menjadi tetap, maka dikenakan pidana kurungan paling lama dua minggu.
- (4) Pada pengulangan ketiga atau lebih dalam satu tahun, setelah pemidanaan yang kemudian karena pengulangan kedua atau lebih menjadi tetap, dikarenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

d. Pasal 537 KUHP:

“Barang siapa menjual atau memberikan minuman keras atau arak diluar kantin tentara kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pengkat letnan atau kepada istrinya, anak atau pelayan, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah”.

e. Pasal 538 KUHP:

"Penjual minuman keras atau wakilnya yang pada waktu menjalankan pekerjaanyaitu memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak dibawah umur 16 tahun, diancam dengan pidana

kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.

f. Pasal 539 KUHP:

“Barang siapa menyediakan semacam cuma-cuma minuman keras atau arak atau menjanjikan sebagai hadiah pada waktu diadakan pesta keramaian untuk diselenggarakan pawai untuk umum, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Dengan adanya peraturan KUHP diatas, sanksi yang diberikan dianggap terlalu ringan dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan, dan tidak adanya larangan minuman oplosan maka dari itu Kota Semarang mengeluarkan peraturan daerah yakni PERDA Kota Semarang, yang dijelaskan dalam Pasal 44; Pasal 51; Pasal 52; Pasal 53; Pasal 54; Pasal 55 ayat (1); Pasal 56; Pasal; Pasal 57 ayat (1) dan (2), yang memberikan sanksi yang lebih berat, yang menyebutkan bahwa:

a. Pasal 44 :

“Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi minuman oplosan”.

b. Pasal 51 :

“Setiap orang yang mengedarkan Minuman Beralkohol di tempat yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

c. Pasal 52 :

“Produsen Minuman Beralkohol Tradisional yang tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

d. Pasal 53 ayat (1) :

Setiap orang yang menjual secara langsung Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C selain dari tempat sebagaimana diatur dalam Pasal 27, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

e. Pasal 54 :

“Pengecer dan Penjual Langsung yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

f. Pasal 55 :

“Distributor dan Sub dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), TBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dan penjual langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) yang tidak memiliki izin dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

g. Pasal 56 :

“Distributor, Sub Distributor, TBB, Penjual Langsung dan Pengecer yang Melakukan penyimpanan penyimpanan Minuman Beralkohol tidak terpisah dengan barang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

h. Pasal 57 ayat (1) dan (2):

- (1) Setiap orang yang memproduksi Minuman Oplosan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- (2) Setiap orang yang mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi Minuman Oplosan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

4. Tindak Pidana Pengguna Minuman Keras Oplosan dan Sanksi Pidananya

Penggunaan miras oplosan sesuai dengan Perda Pasal 44 dijelaskan bahwa: “Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual, dan mengkonsumsi minuman oplosan”. Setiap orang dalam Pasal ini adalah orang perseorangan atau korporasi baik itu berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Dengan demikian pengguna miras oplosan adalah pelaku tindak pidana yang harus dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran dari diri yang bersangkutan dan juga telah mengerti bahwa perbuatan itu dilarang menurut hukum yang berlaku, hal tersebut dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur⁵¹:

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
- c. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan hukum tindak pidana dalam hal ini pengguna (pengoplos) minuman keras oplosan mengacu dalam Pasal 136 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Selain itu khususnya di kota Semarang mengacu pada Perda yakni Pasal 57 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang yang mengedarkan, menyimpan, menjual, dan mengkonsumsi minuman

⁵¹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 34.

oplosan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

B. Tinjauan Umum Tentang Polri Sebagai Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia

(a) Pengertian Polri di Indonesia dan Fungsi Polri

1. Pengertian Polri

Nama ‘Polisi’ di Negara Indonesia adalah menggunakan istilah ‘Politie’ yang berasal dari Negara Belanda yang pernah menjajah Negara Indonesia. Hal tersebut sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum belanda yang sama saat ini banyak dianut oleh Negara Indonesia⁵².

Menurut Momo Kelana bahwa istilah ‘Politie’ dalam kutipannya ungkapan dari Van Vollenhoven yakni:

“Suatu organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah mau menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan pemerintah. Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan dan memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan⁵³.

Keterangan di atas menunjukkan polisi adalah bagian dari suatu organisasi pemerintah dan sebagai alat pemerintah yang memiliki

⁵² Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, Laksbang Presindo, hlm 2.

⁵³ Van Vollenhoven dalam Memet Tanumidjaja dikutip Momo Kelana, 1984, *Hukum Kepolisian*, Edisi Ketiga, Jakarta, PTIK, hlm. 18

wewenang dan kewajiban yang diberikan pemerintah terhadap polisi yang diantaranya adalah menjalankan pengawasan secara langsung terhadap masyarakat dengan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat, baik itu diselesaikan oleh polisi maupun oleh pengadilan.

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi yang mengatakan bahwa Kepolisian sebagai fungsi salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat⁵⁴.

Pengertian 'Kepolisian' dan 'Polri' memiliki pengertian yang berbeda, Kepolisian adalah suatu lembaga pemerintah yang terorganisir dan terstruktur dalam organisasi Negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas, wewenang dan tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, aparat penegak hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan masyarakat, sedangkan Polri adalah sebagai suatu organ atau suatu lembaga pemerintahan yang ada dalam Negara, sedangkan Kepolisian merupakan sebagai suatu organ dan sebagai suatu fungsi sebagai organ⁵⁵.

⁵⁴ Sadjjiono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino, hlm.327

⁵⁵ Sadjjion, Op.Cit., hlm. 5-6

2. Fungsi Polri

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 yaitu:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih menjabarkan fungsi pemerintah dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.

Adapun dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu⁵⁶:

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh institusi yang membidangi.

⁵⁶ Sadjijono, *Op.Cit*, hlm. 17.

(b) Tugas dan Wewenang Polri**1. Tugas Polri**

Polri memiliki suatu tugas dan wewenang yang tidak boleh menimbulkan suatu kecemasan, kebimbangan serta ketergantungan pada pihak yang terkait dengan perkara, baik itu dalam menjalankan tugas maupun dalam kesehariannya tanpa memandang jabatan dan kedudukannya.

Hal itu sesuai dengan salah satu bunyi aturan pada kode etik kepolisian, yakni

“Menegakkan hukum dan menghormati kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat secara adil dan bijaksana”.

Kode etik kepolisian dibuat sebagai suatu antisipasi agar dalam penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan konsep dasar dari tugas dan wewenangnya. Sehingga terbentuklah suatu lembaga Kepolisian yang professional sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Pasal 13 tersebut dapat diperinci dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi;
- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional (PIKN);
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan tugas kepolisian yang secara umum diatur ke dalam undang-undang. Dalam perkembangannya diharapkan tugas kepolisian ini dapat mengantisipasi era globalisasi yang berkembang dan tentunya kejahatan yang kian marak. Sehingga kepolisian dituntut harus lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya, salah

satunya yakni dalam menangani kejahatan dibidang minuman keras yang akhir-akhir ini banyak memakan korban.

2. Wewenang Polri

Kewenangan polri dalam Negara hukum adalah kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yang artinya adalah suatu wewenang yang bersumber dari peraturan-peraturan perundang-undangan, sehingga di dalam Negara hukum asas legalitas dapat sebagai dasar dalam menjalankan suatu wewenang. Asas legalitas sendiri merupakan suatu perbuatan pidana yang hanya dapat dipidanakan jika sebelumnya sudah ada undang-undang yang mengaturnya (mengkriminalisasi) perbuatan tersebut⁵⁷.

Kewenangan lain selain asas tersebut dipertegas lagi di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diperinci kedalam beberapa Pasal diantaranya Pasal 16 s/d Pasal 19, yaitu penyelidikan, penyidikan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, dan lain sebagainya. Dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan:

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
 - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

⁵⁷ M.Khoidin & Sadjijono, *Op.Cit.*, hlm. 77

- b. Melarang setiaporang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidikan dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang berwenang di tempat pemeriksaan migrasi dalam keadaan atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindakan pidana;
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

2. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut;

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati Hak Asasi Manusia.

Pasal-pasal di atas dapat dijelaskan yang terkait tugas polisi yang utama yang terkait dengan tugas-tugas penyidikan diantaranya dalam perihal sebagai berikut:

1. Penyidikan

Penyelidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Kemudian tujuan penyelidikan ini adalah untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup agar dapat dilakukan tindakan lanjutan berupa penyidikan⁵⁸.

Penyidikan dilakukan oleh pihak penyidik yang bertugas yang diatur sesuai dengan Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengenai penyidik yaitu pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Bukan hanya itu, pengertian penyelidikan juga diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia , yang

⁵⁸ M. Alam Kuffa, 2002, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, Malang, UMM Press, hlm. 23

menyebutkan bahwa penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Pasal 5 ayat (2) Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa wewenang pejabat polisi dalam menyelidiki adalah sebagai berikut:

Penyelidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4;

- 1) Karena kewajibannya mempunyai wewenang;
 - a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b) Mencari keterangan dan barang bukti;
 - c) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Atas perintah penyidikan dapat dilakukan tindakan berupa;
 - a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - b) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - d) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidikan.

Kewenangan penyidikan tersebut di atas sebenarnya merupakan sebagian dari kewenangan penyidikan, oleh karena itu penyidikan merupakan sub fungsi atau bagian yang taj terpisahkan dari penyidikan.⁸ Maka dari itu disamping penyidik memiliki kewenangan dalam hal penyidikan juga mempunyai kewenangan penyelidikan.

2. Penyidikan

Pengertian penyidikan ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjelaskan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Wewenang penyidik dan penyidik pembantu diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), antara lain:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari orang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda penyalah diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik apabila sudah selesai maka berkas tersebut harus diserahkan kepada penuntut

umum, yang diatur dalam Pasal 110 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu “Dalam hal penyidikan telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum”, dan dalam pasal 110 ayat (4) menjelaskan bahwa “penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik”.

(c) Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya kebijakan melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal Policy*) kebijakan ini tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan social (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial, dan kebijakan dan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Dilihat dari arti luas kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan hukum pidana.

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana Non Penal dan sarana Penal. Pengkajian mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal

dengan sistem penegakan kredit sindikasi dalam hukum atau criminal law enforcement yang mana bagiannya adalah kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (*penal*)⁵⁹.

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana⁶⁰.

Upaya penal adalah upaya penanggulangan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggaran hukum atau pelaku kejahatan. Jadi upaya ini dilakukan setelah kejahatan yang terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan.

Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud langkah kebijakan. Penanggulangan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitik beratkan pada upaya yang bersifat “represif”

⁵⁹ Adil, “Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia”, **Jurnal Hukum**, Vol. 7 No.1, 2014, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, hlm. 2

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang, Pustaka Magister, hlm. 23.

atau disebut penindasan/penumpasan, setelah kejahatan atau tindak pidana yang terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijaksanaan penegakan hukum.⁶¹

Upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan NAZA dapat dilakukan dengan cara yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif (pencegahan), represif (penindakan). Ketiga fungsi tersebut merupakan fungsi yang utama sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 UU Kepolisian, yakni:⁶²

1. Upaya Pre-Emtif (pembinaan). Upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindakan pidana. Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana secara pre-emptif adalah menanamkan nilai/norma-norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang, meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran, tetapi tidak ada niatannya untuk melakukan pelanggaran hal tersebut maka tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya ini faktor niatan menjadi hilang meskipun ada kesempatan.
2. Upaya Preventif (pencegahan). Upaya ini merupakan tindak lanjutan dari upaya Pre-emptif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya

⁶¹ Ibid.

⁶² A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makasar, Pustaka Refleksi Books, hlm.79.

preventif yang dimaksud sebagai usaha untuk mengadakan perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan dari dalam masyarakat. Jadi dalam upaya preventif ini menutup kesempatan untuk melakukannya.

3. Upaya Represif. Upaya ini merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, Bandar, pengedar, dan pemakai secara hukum. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif ini adalah memperbaikinya perbuatannya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat umum, sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya. Pada upaya represif tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat lima sub sistem yaitu, sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan advokat, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Penggunaan Minuman Keras Beralkohol Oplosan di Kota Semarang

Kota Semarang adalah kota yang cukup rawan akan peredaran gelap Miras atau narkoba, hal itu disebabkan karena kota jogja adalah kota pariwisata, diambil contoh adalah daerah kota tua, disitu hampir semua caffe menyediakan miras berbagai merek. Polrestabes Semarang mengadakan sampel acak, mendatangi 3 (tiga) caffe untuk menunjukkan bukti surat ijin atas penjualan minuman keras tersebut, dan dari 3 (tiga) caffe tersebut tidak ada yang memiliki surat ijin penjualan miuman keras, padahal di Kota Semarang sendiri jika ingin menjual miras beralkohol harus memiliki surat ijin sesuai dengan Perda Kota Semarang Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan⁶³.

Dari keterangan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan miras dari tahun ketahun mengalami peningkatan, ditahun 2018 baru sampai bulan juli sudah ada 10 kasus diantaranya 1 (satu) perempuan dan ada yang dibawah umur yakni berumur 14 tahun. Untuk pengguna diberikan sanksi berupa pembinaan dan untuk pengedar sendiri diberikan sanksi tipiring (sanksi ringan) 3 bulan kurungan. hal tersebut tentunya kita sebagai generasi penerus bangsa prihatin akan hal tersebut.

⁶³ Wawancara dengan Woro Ganis Banit II Unit VC RESKRIM UMUM Polrestabes Semarang , Tanggal 07 November 2019.

Dari data kasus diatas Maka Polrestabes Semarang melakukan anlisis faktor penyebab penggunaan minuman keras berlkohol di Kota Semarang, yakni sebagai berikut :

1. Faktor Minuman Keras itu Sendiri

- a. Sifat dari minuman keras ini yang memiliki kandungan yang dapat memberikan kenikmatan terhadap penggunanya sehingga pengguna ingin mengulang dan menggunakan secara terus-menerus. Miras adalah minuman yang memiliki kandungan yang sangat berbahaya yang sama dengan narkoba sehingga pengkonsumsi miras ini dapat menimbulkan ketagihan/ketergantungan. Setelah mengetahui dari hal coba-coba bahwa mengkonsumsi miras merasakan kenikmatannya maka cepat atau lambat akan merasakan ketagihan baik psikis yang selanjutnya diikuti ketagihan fisik. Apabila seseorang telah mengalami ketergantungan terhadap miras maka seseorang tersebut dalam mengkonsumsi miras selalu bertambah dalam pemakaiannya dan semakin sulit untuk dihentikan.
- b. Keberadaan dan ketersediaan miras yang sangat mudah didapat dan berbagai macam campuran/oplosannya yang sangat mudah dibeli dan sangat murah yang mempengaruhi seseorang terhadap penyalahgunaan barang yang berbahaya ini semakin tinggi. Di Kota Semarang sendiri ada yang memproduksi/pembuaat miras (arak/ciu) secara tradisional yang tidak sesuai dengan prosedur

yang memiliki kandungan alkohol yang cukup tinggi bahkan tidak layak untuk dikonsumsi. Selain itu miras tradisional ini memiliki harga yang cukup murah sehingga seorang yang ingin menggunakannya/mengkonsumsinya sangatlah mudah untuk mendapatkannya.

- c. Bahan campuran oplosan yang mudah didapat, selain itu miras oplosan ini dibuat supaya jumlahnya lebih banyak, dan supaya cepat memberikan efek yang diinginkan, sehingga miras beralkohol ini dicampurlah dengan bahan-bahan yang seharusnya tidak boleh dicampur dengan minuman yang mengandung alkohol⁶⁴.

2. Faktor Individu

- a. Penggunaan miras beralkohol ini biasanya didasari akan lemahnya keimanan dan ketaqwaan seseorang terhadap Allah SWT, keimanan dan ketaqwaan adalah pondasi agama dari seseorang jika seseorang tersebut lemah akan keimanan dan ketaqwaannya maka seseorang tersebut gampang dan mudah terjerumus akan hal-hal negatif seperti mengkonsumsi atau menggunakan minuman yang jelas dilarang oleh agama dan jelas berbahaya bagi diri sendiri ataupun orang lain.

⁶⁴ *Ibid.*

- b. Adapula seseorang yang ingin bergaul dengan suatu komunitas tertentu maka seseorang tersebut harus mengkonsumsi miras seolah-olah agar dilihat pemberani oleh teman-temannya, bisa menyamakan dengan teman-temannya sehingga mereka yang mengkonsumsi miras merasa percaya diri.
- c. Banyak orang yang tidak mengetahui seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan oleh penggunaan miras ini bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.
- d. Bagi seorang remaja/anak, rasa ingin tahu dan mencoba sangatlah tinggi, sehingga mereka tidak pernah menghiraukan dampak yang akan terjadi setelah penggunaan miras tersebut, dan hal ini adalah sebagai pelampiasan bagi anak remaja jika mereka merasa terpuruk.
- e. Sifat seseorang anak remaja yang labil yang masih gampang dipengaruhi dan pikiran yang dangkal tidak memperhatikan dampak yang akan terjadi terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, sehingga seseorang tersebut memilih miras dan obat-obatan terlarang lainnya sebagai penghibur diri sendiri untuk penghilang rasa penat dan kesedihan dijiwanya⁶⁵.

⁶⁵ *Ibid*

3. Faktor Lingkungan

a. Faktor Lingkungan Keluarga

- (1) Faktor lingkungan keluarga sangatlah berpengaruh bagi perkembangan jiwa dan mental seseorang, misal keluarga yang broken home, orang tuanya cerai, sehingga perhatian orang tua terhadap anak sangatlah kurang, anak bisa bergaul dengan bebas dan yang biasanya seorang anak bergaul dengan teman sebayanya disini seorang anak bergaul dengan orang dewasa dan mencari pelampiasan dengan cara mengkonsumsi miras.
- (2) Ada juga orang tua yang mendidik anak dengan cara otoriter ataupun dengan cara mengekang dengan berlebihan, sehingga anak merasa terkekang dan akhirnya anak mencari kebebasan yang sebesar-besarnya tanpa kontrol⁶⁶.

b. Faktor Lingkungan Tempat Tinggal

- (1) Lingkungan pergaulan seorang anak yang kurang akan perhatian masyarakat dan yang masyarakat disekitar relatif mengkonsumsi miras cepat atau lambat anak tersebut akan terpengaruh juga dengan mengkonsumsi miras. Baik itu di dalam lingkungan masyarakat sehari-hari dia tinggal ataupun di lingkungan tempat dia belajar.

⁶⁶ *Ibid*

- (2) Seorang anak yang suka berkunjung ke tempat-tempat hiburan malam, apalagi di daerah Kota Semarang ini sangatlah banyak sekali hiburan malam, karena hiburan malam ini hampir semua menyediakan miras, mau tidak mau seorang anak pasti ingin mencobanya⁶⁷.

Dari berbagai faktor diatas tentunya ada dampak yang disebabkan oleh penggunaan miras oplosan itu sendiri, yakni banyak korban yang berjatuhan bahkan sampai meninggal dunia akibat miras oplosan ini. Bukan hanya itu miras digunakan untuk melakukan aksi klitih. Di Kota Semarang yang akhir-akhir ini banyak terjadi klitih dan banyak korban yang berjatuhan akibat klitih ini, dari kasus klitih itu semua yang ikut gank klitih mengkonsumsi miras itu dikarenakan supaya mereka semakin berani, tega, dan semakin percaya diri dalam melakukan aksinya. Tetapi tidak semua yang mengkonsumsi miras ini melakukan hal-hal yang negatif yakni melakukan onar dan berbuat rusuh di masyarakat. Ada yang mengkonsumsi miras hanya untuk bersenang-senang. Tapi walaupun seperti itu miras oplosan tetaplah minuman yang dilarang oleh Undang-undang dan agama, karena menimbulkan banyak hal-hal negatif, seperti kecanduan, merusak mental, merusak akal, merusak organ tubuh, dan bahkan sampai menyebabkan kematian bagi penggunanya⁶⁸.

⁶⁷ I Wawancara dengan Kanit Riyono, selaku Kepala Krimsus Polrestabes Semarang, Tanggal 07 November 2019.

⁶⁸ *Ibid*

Dari berbagai faktor dan dampak diatas penulis berpendapat bahwa faktor lingkungan baik itu lingkungan tempat tinggal ataupun faktor lingkungan keluarga sangat berpengaruh dalam perkembangan seorang anak. Karena lingkunganlah yang paling dekat dengan diri kita, faktor keluarga dan lingkungan tempat tinggal yang kurang harmonis dan terlalu bebas dan sehingga kurangnya kontrol dari pihak keluarga dan masyarakat, maka akan cenderung melakukan hal-hal yang kurang positif seperti mengkonsumsi miras ataupun narkoba. Untuk dampaknya sendiri miras ini sangatlah berbahaya bagi diri sendiri ataupun orang lain. Maka dari itu diharapkan keluarga dan lingkungan tempat tinggal dapat memberikan pengawasan-pengawasan yang ketat kepada seseorang baik itu orang dewasa terlebih seorang anak sehingga tidak ada penggunaan miras ataupun narkoba.

B. Upaya Polrestabes Semarang dalam Menanggulangi Tindak Pidana Minuman Keras Beralkohol Oplosan di Kota Semarang

Upaya penanggulangan tindak pidana minuman keras beralkohol oplosan yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Semarang ini dilakukan dengan 3 cara yakni:

1. Penanggulangan Secara Preventif

Penanggulangan secara Preventif yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang ini dengan cara melakukan kegiatan seperti melakukan patroli yang biasanya dilakukan oleh Dit Sabara dengan harapan apabila seseorang ingin melakukan tindak pidana minumaan

keras dan mengetahui adanya patroli si pengguna akan membatalkan niatnya. Tidak hanya itu, Polrestabes Semarang juga sering melakukan atau mengadakan razia di tempat-tempat yang dicurigai rawan baik itu penjual ataupun pengguna miras atau narkoba, seperti di tempat-tempat hiburan malam. Usaha yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang ini dimaksudkan untuk mempersempit gerak para pelaku baik itu penjual atau pengguna minuman keras ataupun narkoba, terutama terhadap penjual minuman keras atau pengedar narkoba.⁶⁹

Pengkonsumsi minuman keras khususnya di Kota Semarang kini kian memprihatinkan yakni sudah merambah ke anak. Bahkan dengan perkembangan zaman berbagai cara dilakukan untuk mengelabui aparat penegak hukum dalam melakukan tindak pidana penggunaan minuman keras tersebut. Oleh karena itu Polrestabes Semarang selalu berupaya secara optimal dalam melakukan pencegahan peredaran minuman keras dengan cara menerjunkan personilnya di daerah yang dianggap rawan terjadi peredaran minuman keras ini, seperti di tempat-tempat hiburan malam.

Anggota Polisi Dit Reserse Narkoba ini di dalam menjalankan tugasnya yaitu diantaranya seperti melakukan pemantauan setiap saat ditempat-tempat yang dianggap rawan peredaran miras dan narkoba

⁶⁹ *Ibid*

selalu dilengkapi dengan Surat Perintah dari Dit Narkoba Polrestabes Semarang.⁷⁰

2. Penanggulangan Secara Pre-emptif

Penanggulangan secara Pre-emptif yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Kota Semarang ini adalah dengan cara melakukan penyebaran leaflet kepada masyarakat, memasang spanduk, melakukan penyuluhan ke kampus, sekolah-sekolah, dan masyarakat tentang bahayanya narkoba dan minuman keras. Dari penyuluhan yang dilakukan oleh kepolisian daerah Kota Semarang ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman akan bahaya dan dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan minuman keras apalagi minuman keras oplosan dan bahayanya narkoba yang nantinya dapat merusak mental diri sendiri, yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat, serta Bangsa dan Negara.
- b. Dengan pemasangan spanduk, poster, leaflet ini bertujuan mengkampanyekan anti narkoba dan miras sehingga masyarakat tahu kalau narkoba dan miras ini sangat berbahaya.
- c. Memberdayakan masyarakat untuk berani lapor kepada kepolisian selaku penegakan hukum, apabila mengetahui baik itu seseorang,

⁷⁰ *Ibid*

kelompok, ataupun koorporasi yang mengkonsumsi baik itu miras ataupun narkotika.

- d. Polisi mengadakan kerjasama dengan LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) dan komponen lainnya dalam pencegahan serta penangkalan terhadap penggunaan minuman keras dan narkotika.

Penjelasan di atas merupakan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana minuman keras oplosan secara Pre-emptif yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang dalam memberantas penggunaan minuman keras dan narkotika. Adapun data kegiatan pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang yakni seperti yang dibawah ini:

3. Penanggulangan Secara Represif

Penanggulangan secara represif yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang ini dalam bentuk penegakan hukum guna mengungkap sindikat peredaran minuman keras dan penggunaanya dengan memberikan sanksi yang berat kepada pelaku supaya jera. Polrestabes Semarang khususnya Dit Reserse Narkoba Polrestabes Semarang melakukan terjun langsung melakukan operasi tempat-tempat hiburan malam dan tempat-tempat yang dianggap rawan akan peredaran minuman keras dan apabila didapati baik itu penjual dan pengguna miras maka pihak kepolisian langsung menindak lanjuti dan melakukan penyidikan dan penyelidikan ke para penjual maupun

pengguna. Selain itu Polrestabes Semarang juga bekerjasama dengan masyarakat apabila ada kejadian yang tidak diinginkan segera melapor ke aparat kepolisian, dan operasi itu dilakukan bisa dari laporan masyarakat dan nantinya pihak kepolisian melakukan penindakan melakukan penyelidikan dan apabila cukup bukti maka akan dilakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan kemudian memproses perkara tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Penyelidikan ini bukanlah suatu fungsi yang bisa berdiri sendiri, yang terpisah dari penyelidikan, melainkan hanya merupakan salah satu prosedur atau cara sub dari fungsi penyelidikan yang mendahului suatu tindakan. Di dalam penegkan hukum pidana, penyelidikan merupakan suatu tahap awal yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Penyidik akan melakukan penyelidikan setelah dalam proses penyelidikan yang merekomendasikan bahwa ada tindak pidana yang mesti dilakukan penyelidikan. Untuk kepentingan penyelidikan penyidik melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan hal tersebut bisa dilakukan secara paksa terhadap pengguna ataupun penjualnya, jika pihak yang bersangkutan memberontak demi kelancaran dalam proses penyelidikan.

Pemberian sanksi terhadap pengguna minuman keras ini jika itu dilakukan oleh anak-anak dibawah umur maka pihak kepolisian

memanggil orang tua pelaku dan memberikan arahan-arahan, pengetahuan, baik itu terhadap orang tuanya ataupun terhadap pengguna tersebut. Sedangkan jika itu dilakukan oleh orang dewasa maka pihak kepolisian khususnya Polrestabes Semarang melakukan tindakan berupa:

- 1) Jika pengguna hanya mengalami mabuk yang ringan dan masih bisa diajak berbicara maka dia hanya diberikan teguran dan menyita atau membuang miras yang ada.
- 2) Jika pengguna tersebut mengalami mabuk berat dan tidak terkendali maka orang tersebut untuk sementara diamankan oleh pihak kepolisian sampai dia sadar tidak terpengaruh miruman keras, dan kemudian diberikan arahan tentang bahayanya miras, kemudian jika sudah benar-benar sadar pengguna tersebut dikembalikan kerumahnya masing-masing.
- 3) Pengguna miras baik itu miras beralkohol ataupun miras oplosan tidak dilakukan penahanan dan/atau denda sebagaimana mestinya, karena pengguna disini adalah sebagai korban dari si pengedar atau penjual, dan pemproduksi miras beralkohol (oplosan). Untuk pengedar/penjual jika itu terbukti dia melakukan penjualan barang tersebut, maka sanksi yang diberikan adalah denda sebesar Rp 20.000.000-50.000.000,- atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan, hal itu sesuai dengan Perda Kota Semarang Tentang

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.

Kepolisian Polrestabes Semarang yang utamanya penyidikan dalam kasus penggunaan miras dalam menjalankan tugasnya sudah cukup sangat baik, karena polisi bekerja tidak hanya menunggu adanya laporan dari pihak masyarakat terkait dengan minuman keras ini. Pihak kepolisian bekerja semaksimal mungkin hal tersebut terlihat dari dilakukannya operasi atau patroli keliling di tempat-tempat hiburan malam dan tempat-tempat yang dicurigai adanya peredaran miras.

Berdasarkan kasus yang ada tidak jarang polri menangkap orang yang sama hal itu dikarenakan pengguna miras di Kota Semarang sangatlah banyak dan bisa dibilang menjanjikan, karena sanksi yang diberikan hanyalah denda, dan polri tidak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah aturan atau undang-undang yang ada yang harus ditaati dan dijalankan. Dengan demikian miras bukan masalah yang sepele, bukan masalah yang ringan, sudah selayaknya diberikan sanksi yang benar sehingga baik itu pengguna dan pengedar bisa benar-benar jera tidak mengulangi perbuatan tersebut, kita sebagai masyarakat seharusnya menyadari bahwa miras bukan hal yang baik untuk pelampiasan dan tidak baik untuk diri sendiri ataupun orang lain, sebisa mungkin kita harus menjauhi dan melakukan upaya untuk mengurangi peredaran dengan cara melapor ke pihak yang berwenang sehingga bisa mengurangi dampak buruk yang diakibatkan oleh minuman keras tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab-bab yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab penggunaan minuman keras beralkohol oplosan di Kota Semarang adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor minuman keras sendiri yakni apabila seseorang sudah mengkonsumsi atau menikmati miras tersebut maka dia akan mengulangnya secara terus menerus. Karena sifat dari mirs sendiri yang memberikan efek candu terhadap penggunanya, dan kemudian miras sendiri khususnya di Kota Semarang sangat mudah didapat dan harga yang sangat murah.
 - b. Faktor individu yakni dipengaruhi oleh faktor diri sendiri yang pada dasarnya kurangnya pendidikan moral agama yang rendah dan bagi remaja yang cara berfikirnya masih labil sehingga mudah terpengaruh oleh hal-hal yang baru sehingga rasa ingin mencoba sangat tinggi dan tanpa berfikir panjang kedepan, dan sebagai pelampiasan emosi sesaat.
 - c. Faktor lingkungan, lingkungan sekitar terutama di lingkungan keluarga berpengaruh sangat besar karena keluarga orang yang sangat dekat dengan diri kita, sebagian besar disebabkan oleh

keluarga yang Boken home/orang tua cerai sehingga anak kurang mendapat perhatian dari orang tuanya sehingga anak tersebut terjerumus kedalam hal-hal yang negatif seperti miras dan narkoba. Selain keluarga faktor tempat tinggal sangatlah berpengaruh bagi perkembangan anak, pergaulan seorang anak yang kurang akan perhatian masyarakat dan yang masyarakat disekitar relatif mengkonsumsi miras cepat atau lambat anak tersebut akan terpengaruh juga dengan mengkonsumsi miras. Baik itu di dalam lingkungan masyarakat sehari-hari dia tinggal ataupun di lingkungan tempat dia belajar.

2. Upaya Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tindak pidana minuman keras beralkohol yaitu dilakukan dengan tiga cara yakni, Pre-emptif, Preventif, Represif.
 - a. Upaya preventif yakni pencegahan dengan cara melakukan patrol oleh Dit Sabara Polrestabes Semarang ditempat-tempat yang dimungkinkan adanya peredaran miras ataupun narkoba dan diharapkan apabila nantinya ada seseorang yang ada niatan melakukan penyalahgunaan barang tersebut maka tidak jadi menggunakan barang tersebut. Kemudian Polrestabes Semarang juga sering melakukan razia di tempat-tempat hiburan malam guna mempersempit ruang gerak pelaku pengguna miras dan narkoba.

- b. Upaya Pre-emptif yakni dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan terhadap masyarakat, sekolah-sekolah, bekerja sama dengan LSM, lembaga pendidikan, diharapkan agar khususnya anak-anak tau akan bahayanya miras dan narkoba sehingga mereka menjauhi hal dan takut menggunakan miras ataupun narkoba. Tidak hanya itu penyuluhan dilakukan dengan cara pemasangan baliho, sepanduk, adapun tujuannya adalah pengkampanyekan kepada masyarakat khususnya Kota Semarang agar menjauhi narkoba dan minuman keras.
- c. Upaya represif yakni dalam bentuk penegakan hukum terhadap baik itu pengguna dan penjual miras dengan memberikan sanksi sesuai dengan perda. Yang diharapkan pengguna dan penjual jera dan tidak mengulangnya kembali.

B. Saran

1. Agar terus meningkatkan kinerja Polisi terutama oleh satuan Dit Reserse Polrestabes Semarang dalam memerangi miras dan narkoba, baik itu dalam bentuk razia ataupun penyuluhan di lingkungan pelajar dan masyarakat guna mempersempit gerak peredaran miras dan narkoba sehingga masyarakat jauh dari miras dan narkoba sehingga anak berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang baik.
2. Pemberian pembinaan penyuluhan hendaknya dilakukan sejak dini atau dikenalkan bangku SD (Sekolah Dasar), karena supaya mereka benar-

benar tahu akan bahayanya akan miras dan narkoba sehingga mereka enggan dan takut akan miras dan narkoba.

3. Permasalahan miras merupakan permasalahan yang harus diperhatikan lebih serius karena selain tanggung jawab pemerintah itu juga tanggung jawab bersama selaku masyarakat, sehingga harus dilakukan kerjasama secara harmonis antara masyarakat, lembaga pendidikan, keluarga dan kepolisian dalam memerangi miras ini.
4. Hendaknya pemberian sanksi yang cukup berat baik itu terhadap pengguna dan pengedar miras supaya mereka benar-banar jera tidak mengulangi perbuatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Ali Zainuddin, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Grafika Indonesia, Jakarta.
- Arief Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang, Pustaka Magister.
- Alam A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Pustaka Refleksi Books.
- Abidin Farid Zainal, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Chazawi Adami, 2005, *Tindak Pidana Kesopanan*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Chazawi Adami, 2010, *Pelajaran Pidana Bagian 1*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Dirdjosisworo Soedjono, 1994, *Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi*, Bandung, Remaja Karya.
- Djamil. M Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Geldard Kathryn, 2012, *Konseling Remaja*, Yogyakarta, Pelajar.
- Hawari Dadang, 2005, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat adiktif)*, Jakarta, Balai Penerbit FKUI.
- Hawari Dadang, 2004, *Terapi dan Rehabilitasi Muthakhir Pasien NAZA*, Jakarta, Kedokteran Universitas Indonesia
- Hawari Dadang, 1991, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adektif*, Jakarta, Fakultas Hukum UI.
- Harahap M. Yahya, 2007, *Pembahasan dan Penerapan KHUAP*, Jakarta, Sinar Grafik.
- Hakim M. Arif, 2004, *Bahaya Narkoba Alkohol*, Bandung, Cetakan Mail.
- Ilyas Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Indonesia.
- Kuffa M. Alam, 2002, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, Malang, UMM Press.
- Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Banduung, P.T. Citra Aditya Bakti.

- Nurwijaya Hartati & Zullies Ikawati, 2010, *Bahaya Alkohol*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Rahardi Pudu, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya, Laksbang Mediatama,
- Setyo Harjanti R, 2010, *Perilku Kriminal Pada Pecandu Alkohol*, Depok, Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma.
- Sugiyono dan Muchtadi TR, 1992, *Ilmu Pengetahuan Bahan Pangan*, Bogor, PAU IPB.
- Sasongko Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, Laksbang Presindo.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, Laksbang Persino.
- Simons dalam Leden Marpaung, 2008, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta, P.T. Rineka Cipta.
- Syah Anang, 2000, *INABAH (Metode Penyadaran Korban Penyalahgunaan NAPZA)*, Tasikmalaya, Podok Pesantren Suryalaya.
- Sunarso Siswanto, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta, Rajawali Pers,
- Sunarso Siswanto, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta, P.T. Rineka Cipta.
- Syamsiddin Rahman, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media,
- Supratiknya, 1995, *Tinjauan Psikologi Komunikasi Antar Pribadi*, Yogyakarta, Kanisius (Anggota IKAPI),
- Soekamto Soejono, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kita Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kota Semarang No. 8 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.

JURNAL :

Zulfa Azzah Fadhlika, dkk, 2019 dengan judul "*Fenomena Penjualan Miras Berjenis Ciu di Kawasan Bergota Kelurahan Randusari, Semarang Selatan dalam Kajian Kriminologi*". Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dalam Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 5 (2) : 301-324.

Elfira Noor Rizky, 2018, *Implementasi Kewenangan Kepolisian Dalam Penanggulangan Beredarnya Miras (Studi Kasus Di Sukoharjo)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Firman Yoga Rizki Wiratomo. 2014. *Penyidikan Terhadap Penjual Minuman Keras Beralkohol "Oplosan" Di Kota Malang Yang Konsumennya Meninggal Dunia (Studi Di Polres Kota Malang)*. Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang,

Andri Winjaya Laksana,SH,.MH, 2014, *Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Kejahatan Akibat Minuman Keras Di Kota Semarang (Studi Kasus Di Polwiltabes Semarang)*. Fakultas Hukum Unissula Semarang, Jurnal Khumairah

Adil, 2014, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia", Jurnal Hukum, Vol. 7 No.1, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

- Khairu Nasrudin, 2017, “Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras”, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12.no. 4, Mahasiswa Program Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.
- Kasman Tasaripan, 2013, “Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Peranannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 1, No. 2.
- Reni Widyastuti, 2008, “Penegakan Hukum: Mengubah Strategi dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan”, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 26 No. 3, 2008, Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan Bandung.
- Rohadi & Sri Kusriyah, 2017, “Peran Polisi Masyarakat (POLMAS) Dalam Menangani Perbuatan Akibat Minuman Keras Di Wilayah hukum Polres, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 3, Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.
- Rajamuddin. A., 2014, “Tinjauan Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Minuman Keras di Kota Makassar”, Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2, Dosen Ilmu Hukum UIN Alauddin, Makassar.
- Riska Mardatila. P., 2017, “Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut KUHP 351”, Jurnal Lex Crimen Vol. VI, No. 2.
- Sulis Winurini, 2018, “Remaja dan Perilaku Beresiko Terhadap Minuman Keras Oplosan”, Jurnal Hukum, Vol. X, No. 8/II/Pustil.
- Taufikin, 2014, “Hukum Islam (Tentang Minuman Keras Pencegahan dan Penanggulangan Pelaku Minuman Keras di Desa Sidomulyo”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 6, No. 2, Dosen Stain Kudus.
- Winjaya. A. L., 2014, “Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Kejahatan Akibat Minuman Keras di Kota Semarang (Studi Kasus di Polwil Tabes Semarang), Jurnal Pembaruan Hukum, Vol. 1, No. 3, Dosen Fakultas UNISSILA, Semarang.

INTERNET :

<https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2019/01/21/tenggak-miras-oplosan-3-warga-kritis-1-tewas/>

<http://jogja.tribunnews.com/2018/04/10/korban-tewas-akibat-miras-oplosan-di-bandung-terus-bertambah-kini-masuk-kejadian-luar-biasa>, diakses pada 16 April 2018 pukul 20:04.

<http://www.rmoljateng.com/read/2019/11/28/23483/Produksi-Miras-Import-Oplosan,-Seorang-Pemuda-Ditangkap->